



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ISLAM DAN DEMOKRASI

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Jakarta, 19 Juni 2010

1

Pendahuluan

- Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa *reserve*, sementara yang lain, justru bersikap ekstrem. Kondisi ini dipicu dengan banyak dari **kalangan umat Islam sendiri** yang **kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi**.
- Sebaliknya, kelompok yang kurang memahami Islam, sering melontarkan pertanyaan; **benarkah ada demokrasi dalam Islam?** Seolah-olah, Islam hanya membicarakan masalah ibadah dan tidak berbicara masalah sosial kemasyarakatan, apalagi menyangkut urusan politik.

2

Islam

- Islam (al-islām, "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam memiliki arti "**penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Allāh)**". Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim atau Muslimat dan meyakini bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia.
- Agama Islam termasuk agama samawi (agama-agama yang dipercaya oleh para pengikutnya diturunkan dari langit), termasuk golongan agama Ibrahim, dan diikuti oleh **lebih dari satu seperempat milyar orang**, sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen.
- **Islam adalah ad-Dien (sistem hidup) yang sempurna.** Tidak ada satu urusan manusia yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, yang tak diatur Islam. Segala sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada manusia, telah disampaikan Allah lewat Rasul-Nya. Tidak ada satu hal yang akan membawa keburukan, tidak diperingatkan dan dicegah oleh Allah lewat Rasul-Nya.

3

Islam

Prinsip Islam yang Bersesuaian dengan Demokrasi:

1. **Syura: cara pengambilan keputusan** yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an seperti dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai **pelaksana syura adalah ahli halli wa-l'aqdi** pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. (Madani, 1999: 12).

4

Islam

- 2. Al-'adalah** adalah **keadilan**, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis.

Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58 dst. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrim" berbunyi:

"Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam". (lihat Madani, 1999:14).

5

Islam

- 3. Al-Musawah** adalah **kesejajaran**, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat.

Oleh sebab itu **pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan.** Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. (Tolchah, 199:26).

6

Islam

4. Al-Amanah adalah **sikap pemenuhan kepercayaan** yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa':58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan **orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.**

7

Islam

5. Al-Masuliyah adalah **tanggung jawab**. Kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, **maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi**. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan di depan Tuhan.

Dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, **penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya**. Dengan prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyah) ini masing-masing orang berusaha memberi yang terbaik bagi masyarakat. Pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai **sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat)**. (Madani, 1999:13).

8

6. Al-Hurriyyah adalah **kebebasan**, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat **diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya**. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya.

Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

Gerakan-gerakan yang muncul pada abad ke-20 adalah bagaimana sumber-sumber potensial demokrasi dalam tradisi Islam dan kemampuan gerakan-gerakan Islam untuk secara efektif **mempertemukan tuntutan dari autensitas dan gerakan demokrasi populer**.

Maududi memberikan prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan dalam tradisi Islam adalah **konsultasi (Syura), konsensus (Ijma'), independent interpretation judgment (Ijtihad)**.

Demokrasi

- Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada 500 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- **Pericles** (500 SM) telah berhasil membangun sistem pemerintahan demokratis yang dinamakan "**Athenian Democratia**". Aristoteles (384-322 SM), dan Plato (427-347 SM) dan lain-lain, adalah pemikir sekaligus pengembang prinsip-prinsip demokrasi.

11

Demokrasi

- Arti dari istilah demokrasi ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan "**sistem demokrasi**" di banyak negara.
- Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti **egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia)**, dan seterusnya.

12

Prinsip Demokrasi yang Bersesuaian dengan Islam:

1. Kedaulatan rakyat dan kekuasaan mayoritas;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Hak-hak minoritas;
4. Jaminan hak asasi manusia;
5. Pemilihan yang bebas dan jujur dan pembatasan pemerintah secara konstitusional;
6. Persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar;
7. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
8. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat;

- ❑ Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa **rakyat seharusnya menjadi "pemerintah" bagi dirinya sendiri**, dan **wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya**. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi.
- ❑ Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip **amanah dan tanggung jawab (*credible and accountable*)** menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi **penyeimbang dan kontrol pemerintah**.

Pandangan Ulama

- ❑ **Al-Maududi**; secara tegas menolak demokrasi. Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. **Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler.** Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan), namun bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan.
- ❑ **M. Iqbal**; sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Iqbal menawarkan sebuah konsep **demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan.** Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi, melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat.

15

Pandangan Ulama

- ❑ **Muhammad Imarah**; Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. **Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah.** Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berjihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.
- ❑ **Salim Ali al-Bahnasawi**; demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram.

16

Pandangan Barat

- ❑ Pelbagai pandangan orang Eropa (Barat) atas Islam, disebabkan karena informasi tentang Islam memang salah dan tidak ilmiah. Puncak dari pandangan tersebut adalah meledaknya **perang salib (crusade)** abad ke-11.
- ❑ Tahun 1143 oleh seorang sarjana Spanyol, Robertus Ketenensis. Terjemahan ini dicetak 400 tahun kemudian (1616) di Swiss, Jerman, Italia, dan Belanda. Satu abad kemudian, Henri de Boulavin Villers (w. 1722) menulis buku tentang sejarah Muhammad dan Islam secara obyektif, dan menegaskan bahwa Islam lebih dapat diterima.
- ❑ Abad ke-18, pandangan Eropa (Barat) terhadap Islam terus berubah. George Sale (w. 1736), dan John Wolfgang von Gothe (w. 1832) menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris dan Jerman secara lebih obyektif. Gothe dipercaya sebagai sosok yang banyak mengikis persepsi buruk Eropa (khususnya Jerman) terhadap Islam.

17

Pandangan Barat

- ❑ Abad ke-19, kajian keislaman di Eropa makin marak. Johann Jacob Reiske (w. 1773), Joseph von Hammer Purgstalls (w. 1856), Karl Brocklmann (1895), Leon Caetani (w. 1926) yang menulis sejarah Islam, ensiklopedi, sastra dan biografi sarjana Muslim dan lain-lain ke berbagai bahasa di Eropa.
- ❑ **Abad ke-20 menjadi puncak kajian Islam di Eropa**, utamanya paska perang dunia II. Jika di abad sebelumnya motif Islamologi dan Orientalisme masih banyak diselimuti hawa imperialisme, kolonialisme, bahkan kristenisasi. Motif tersebut mulai menguap. Beberapa **Islamolog dan Orientalis** semakin banyak yang mengkaji Islam (dan Timur) secara lebih obyektif. Beberapa nama semisal **Henri Corbin, Pierre Lourié, Annemarie Schimmel, Roger Garaudy, Albert Hourani, Edward Said, Gustaff Lobon, John L. Esposito**, dan lain-lain adalah para sarjana yang **membalik kesan buruk Barat atas Islam**.
- ❑ Peristiwa **WTC dan Pentagon (911)** di paruh mula abad ke-21 kembali mempengaruhi pandangan orang Barat atas Islam. Pada satu sisi, **Islam "dikambinghitamkan" sebagai teroris dunia**. Sebagian orang Barat pun terpengaruh oleh stigma ini, tapi justru, sebagian yang lain dari mereka menjadi penasaran dan "tertarik" untuk mengkaji Islam.

18

Kesimpulan

- ❑ **Konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam.** Prinsip dan konsep demokrasi **yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.**
- ❑ Adapun yang tidak sejalan adalah **ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi.**

19

Kesimpulan

Sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam:

1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijthadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.
6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

20

Langkah agar konsep "demokrasi yang islami" di atas terwujud;

- ❑ Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya.
- ❑ Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.

TERIMA KASIH